



KOMISI PEMILIHAN UMUM

**PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : HUSNI KAMIL MANIK
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum

Pada tahun 2014 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 27 Maret 2014

KETUA KPU,

HUSNI KAMIL MANIK



KOMISI PEMILIHAN UMUM

**PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA SEKRETARIAT JENDERAL KPU
PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ARIF RAHMAN HAKIM
Jabatan : Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : HUSNI KAMIL MANIK
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum
Selaku atasan langsung Pihak Pertama
Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama pada tahun 2014 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

**PIHAK KEDUA
KETUA KPU,**

HUSNI KAMIL MANIK

**PIHAK PERTAMA
SEKRETARIS JENDERAL KPU,**

ARIF RAHMAN HAKIM

FORMULIR PENETAPAN KINERJA

Unit Organisasi Eselon I : Sekretariat Jenderal KPU

Tahun Anggaran : 2014

Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya Partisipasi Pemilih Dalam Pemilu	Persentase Pemilih Yang Menggunakan Hak Pilihnya Dalam Pemilu	75 %
	Persentase Pemilih Perempuan Yang Menggunakan Hak Pilihnya Dalam Pemilu	70 %
Terlindunginya Hak Masyarakat Untuk Menggunakan Hak Pilihnya Dalam Pemilu	Persentase Penduduk Yang Mempunyai Hak Untuk Memilih Tetapi Tidak Terdaftar Di Dalam DPT	2 %
Terwujudnya KPU Sebagai Penyelenggara Pemilu Yang Profesional, Berintegritas Dan Akuntabel	Persentase Kasus Gugatan Hukum Dan Sengketa Hukum Berkaitan Dengan Pemilu Yang Dapat Dimenangkan KPU	85 %
	Persentase PNS Sekretariat Jenderal KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota Yang Melanggar Disiplin Pegawai Negeri	10 %
Meningkatnya Kinerja Manajemen Internal Dalam Mendukung Keberhasilan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi KPU	Opini BPK Atas Laporan Keuangan KPU	WTP
	Jumlah Peraturan KPU Yang Diterbitkan	20
Meningkatnya Kepatuhan Peserta Pemilu dalam penyelenggaraan Pemilu	Persentase Peserta Pemilu Yang Tidak menyampaikan Laporan Dana Awal Kampanye dan Rekening Khusus Dana Kampanye Sampai Dengan Batas Waktu Yang Ditetapkan	5%
	Persentase Peserta Pemilu Yang Tidak Menyampaikan Laporan Dana Kampanye Sampai Dengan Batas Waktu Yang Ditetapkan	5%
Meningkatnya Efektifitas Pengadaan dan Distribusi Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	Persentase KPPS yang Telah Menerima Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara paling lambat 1 hari sebelum Hari Pemungutan Suara Tepat Jumlah dan Kualitas	100%

Jumlah Anggaran Tahun 2014 : Rp. 15.410.408.218.000,-

KETUA KPU,


HUSNI KAMIL MANIK

Jakarta, 27 Maret 2014
SEKRETARIS JENDERAL KPU,


ARIF RAHMAN HAKIM



KOMISI PEMILIHAN UMUM

**PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA BIRO PERENCANAAN DAN DATA
PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : LUCKY FIRNANDY MAJANTO
Jabatan : Kepala Biro Perencanaan dan Data, Setjen KPU
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : ARIF RAHMAN HAKIM
Jabatan : Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum
Selaku atasan langsung Pihak Pertama
Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama pada tahun 2014 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

**PIHAK KEDUA
SEKRETARIS JENDERAL KPU,**

ARIF RAHMAN HAKIM

**PIHAK PERTAMA
KEPALA BIRO PERENCANAAN
DAN DATA,**

LUCKY FIRNANDY MAJANTO

FORMULIR PENETAPAN KINERJA

Sekretariat Jenderal KPU : Biro Perencanaan dan Data, Setjen KPU

Tahun Anggaran : 2014

Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Terwujudnya Efektifitas Perencanaan dan Program KPU	Persentase Unit Kerja yang Sasaran dan Indikator Kinerja Dalam Renja dan RKA-KL Selaras dengan Sasaran dan Indikator Kinerja Dalam Renstra KPU	77,50%
	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Yang Terbit Tepat Waktu	3 Dokumen
Terwujudnya Sistem Administrasi Penyelenggaraan Pemilu Yang Tertib, Efektif dan Efisien Dengan Menggunakan Sistem Aplikasi dan Teknologi Informasi	Persentase KPU/KIP Provinsi Yang Menyampaikan LAKIP Dengan Tepat Waktu	80 %
	Persentase KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Yang Pelaksanaan Keegiatannya Sesuai Dengan Rencana Aksi	100 %
	Jumlah Aplikasi e-Government Yang Diterapkan Di Lingkungan KPU	4 Aplikasi
Terwujudnya Penetapan DPT Yang Berkualitas	Persentase Penduduk Yang Mempunyai Hak Untuk Memilih Tetapi Tidak Terdaftar di Dalam DPT	2 %
Meningkatnya Partisipasi Pemilih di Luar Negeri Dalam Pemilu	Persentase Pemilih di Luar Negeri yang Menggunakan Hak Pilihnya Dalam Pemilu	75%

Jumlah Anggaran Tahun 2014

Kegiatan Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data : Rp. 476.476.930.000,-

Jakarta, 27 Maret 2014

SEKRETARIS JENDERAL KPU,

ARIF RAHMAN HAKIM

**KEPALA BIRO PERENCANAAN
DAN DATA,**

LUCKY FIRNANDY MAJANTO



KOMISI PEMILIHAN UMUM

PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA BIRO KEUANGAN

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : S. HERU HERMAWAN
Jabatan : Kepala Biro Keuangan, Setjen KPU
Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : ARIF RAHMAN HAKIM
Jabatan : Sekretaris Jenderal KPU
Selaku atasan langsung Pihak Pertama
Selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama pada Tahun 2014 ini, berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA
SEKRETARIS JENDERAL KPU,

ARIF RAHMAN HAKIM

PIHAK PERTAMA
KEPALA BIRO KEUANGAN,

S. HERU HERMAWAN

FORMULIR PENETAPAN KINERJA

Sekretariat Jenderal KPU : Biro Keuangan

Tahun Anggaran : 2014

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Terwujudnya pengelolaan administrasi keuangan yang berkualitas, profesional dan akuntabel	Jumlah draft juknis/juklak anggaran di lingkungan KPU.	2 draft
	Jumlah KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyampaikan LPPA tepat waktu dan valid.	531 KPU Prov/KPU Kab/Kota
	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyampaikan Laporan Keuangan sesuai dengan Standard Akuntansi Pemerintahan (SAP).	80%
	Jumlah Bendahara KPU Provinsi yang memahami penatausahaan dan pembukuan bendahara sesuai dengan peraturan yang berlaku.	30 Bendahara KPU Provinsi
	Jumlah KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyampaikan LPPA Tahapan tepat waktu dan valid	531 KPU Prov/KPU Kab/Kota

Jumlah Anggaran Tahun 2014 :

Kegiatan Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan

Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU : Rp.24.584.725.000,00

SEKRETARIS JENDERAL KPU,



ARIF RAHMAN HAKIM

Jakarta, 27 Maret 2014

KEPALA BIRO UMUM,



S. HERU HERMAWAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM

**PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA BIRO HUKUM
PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : NUR SYARIFAH
Jabatan : Kepala Biro Hukum, Setjen KPU
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : ARIF RAHMAN HAKIM
Jabatan : Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum
Selaku atasan langsung Pihak Pertama
Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama pada tahun 2014 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

**PIHAK KEDUA
SEKRETARIS JENDERAL KPU,**

ARIF RAHMAN HAKIM

**PIHAK PERTAMA
KEPALA BIRO HUKUM,**

NUR SYARIFAH

FORMULIR PENETAPAN KINERJA

Sekretariat Jenderal KPU : Biro Hukum

Tahun Anggaran : 2014

Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya Efektifitas Advokasi Hukum Terkait Penyelenggaraan Pemilu	Persentase Kasus Gugatan Hukum dan Sengketa Hukum Berkaitan dengan Pemilu yang Dimenangkan KPU	85%
	Jumlah Rancangan Peraturan KPU yang disahkan menjadi Peraturan KPU	20 Rancangan
	Jumlah KPU Provinsi yang Mendapatkan Sosialisasi Peraturan Dana Kampanye	33 Provinsi
	Jumlah KPU Provinsi yang Mendapatkan Penyuluhan Hukum Penyelenggaraan Pemilu	33 Provinsi
	Jumlah KPU Provinsi yang Mendapatkan Penyuluhan Persiapan Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu.	33 Provinsi
	Jumlah Jenis Kategori Dokumentasi yang Berkaitan dengan Sengketa Hukum	7 Kategori Dokumen
	Persentase DPP Partai Politik Peserta Pemilu yang Menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye dan Rekening Khusus Dana Kampanye sampai dengan Batas Waktu yang Ditetapkan KPU	100%
	Persentase DPP Partai Politik Peserta Pemilu yang Menyampaikan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye sampai dengan Batas Waktu yang Ditetapkan KPU.	100%

Jumlah Anggaran Tahun 2014

Kegiatan Pelaksanaan Manajemen Biro Hukum : Rp. 80.041.764.000,-

Jakarta, 27 Maret 2014

SEKRETARIS JENDERAL KPU,



ARIF RAHMAN HAKIM

KEPALA BIRO HUKUM,



NUR SYARIFAH



KOMISI PEMILIHAN UMUM

**PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA BIRO UMUM
PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ir. R. ACHMAD JUSNADI, M.Si
Jabatan : Kepala Biro Umum, Setjen KPU
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ARIF RAHMAN HAKIM
Jabatan : Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum
Selaku atasan langsung pihak pertama
Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2014 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

**PIHAK KEDUA
SEKRETARIS JENDERAL KPU,**

ARIF RAHMAN HAKIM

**PIHAK PERTAMA
KEPALA BIRO UMUM,**

Ir. R. ACHMAD JUSNADI, M.Si

FORMULIR PENETAPAN KINERJA

Sekretariat Jenderal KPU : Biro Umum

Tahun Anggaran : 2014

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara berdasarkan SAP	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang patuh dan tertib dalam pengelolaan Barang Milik Negara yang material	90%
	Jumlah laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan data SAK	3 Laporan
Meningkatnya kualitas tata kelola administrasi persuratan dan pengelolaan arsip	Jumlah KPU dan KPU Provinsi yang melakukan pemeliharaan/ penyelamatan arsip dinamis dan statis	1 KPU dan 33 Provinsi
Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana pegawai sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Persentase sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik	80%
Meningkatnya kualitas layanan persidangan dan protokol	Persentase hasil notulen rapat yang dapat disampaikan dalam waktu 3 hari	70%
Terwujudnya keamanan dan ketertiban di lingkungan KPU	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU yang dapat ditanggulangi	100%

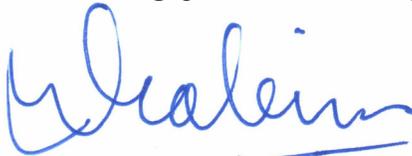
Jumlah Anggaran Tahun 2014 :

Kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya, serta Sarana dan Prasana : Rp. 82.998.769.000,-.

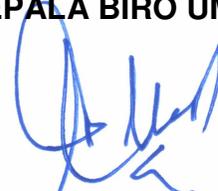
Jakarta, 27 Maret 2014

KEPALA BIRO UMUM,

SEKRETARIS JENDERAL KPU,



ARIF RAHMAN HAKIM



Ir. R. ACHMAD JUSNADI, M.Si



KOMISI PEMILIHAN UMUM

**PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA BIRO SUMBER DAYA MANUSIA
TAHUN 2014**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : FARIDA FAUZIA
Jabatan : Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Setjen KPU
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ARIF RAHMAN HAKIM
Jabatan : Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum
Selaku atasan langsung pihak pertama
Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2014 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

**PIHAK KEDUA
SEKRETARIS JENDERAL KPU,**

ARIF RAHMAN HAKIM

**PIHAK PERTAMA
KEPALA BIRO SUMBER DAYA ANUSIA,**

FARIDA FAUZIA

FORMULIR PENETAPAN KINERJA

Sekretariat Jenderal KPU : Biro Sumber Daya Manusia
Tahun Anggaran : 2014

Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatkan kualitas pembinaan sumber daya manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian	Persentase pengajuan berkas persyaratan administrasi kepegawaian yang diproses 2 (dua) bulan sebelum Terhitung Mulai Tanggal (TMT)	97%
	Persentase pelanggaran disiplin pegawai yang dikenai sanksi	95%
	Persentase pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi sumber daya manusia	97%
	Persentase Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang akan Diangkat melalui Seleksi Umum sesuai dengan kebutuhan KPU	95 %
	Jumlah Dokumen Nominatif Kepegawaian yang termutakhirkan setiap bulan	12 Dokumen

Jumlah Anggaran Tahun 2014

Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia

Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian : Rp. 23.649.704.000,-

Jakarta, 27 Maret 2014

**KEPALA BIRO
SUMBER DAYA MANUSIA,**

SEKRETARIS JENDERAL KPU,



ARIF RAHMAN HAKIM



FARIDA FAUZIA



KOMISI PEMILIHAN UMUM

**PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA
BIRO TEKNIS DAN HUBUNGAN PARTISIPAS MASYARAKAT
PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SIGIT JOYOWARDONO

Jabatan : Kepala Biro Teknis dan Hupmas, Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : ARIF RAHMAN HAKIM

Jabatan : Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum

Selaku atasan langsung Pihak Pertama

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama pada tahun 2014 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

**PIHAK KEDUA
SEKRETARIS JENDERAL,**

ARIF RAHMAN HAKIM

**PIHAK PERTAMA
KEPALA BIRO TEKNIS DAN HUPMAS**

SIGIT JOYOWARDONO

FORMULIR PENETAPAN KINERJA

Sekretariat Jenderal KPU : Biro Teknis dan Hupmas

Tahun Anggaran : 2014

Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya kualitas dukungan teknis dalam rangka mendukung Pemilu	Jumlah pedoman teknis yang diterbitkan dalam rangka mendukung kapasitas penyelenggaraan Pemilu	5 Juknis
	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota yang membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	75%
Meningkatnya partisipasi pemilih dalam Pemilu	Persentase pemilih yang menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu	75%
	Persentase pemilih perempuan yang menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu	75%
Meningkatnya kualitas layanan informasi	Persentase pihak-pihak yang membutuhkan informasi dapat terlayani	75%

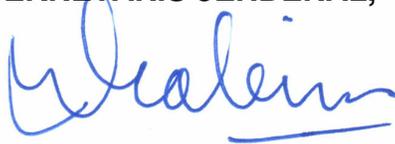
Jumlah Anggaran Tahun 2014

Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan

Teknis/Supervisi/Publikasi/Sosialisasi

Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih : Rp. 215.782.230.000,-

SEKRETARIS JENDERAL,



ARIF RAHMAN HAKIM

Jakarta, 27 Maret 2014
KEPALA BIRO TEKNIS DAN HUPMAS,



SIGIT JOYOWARDONO



KOMISI PEMILIHAN UMUM

**PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA BIRO LOGISTIK
PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : H. BORADI
Jabatan : Kepala Biro Logistik, Setjen KPU
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : ARIF RAHMAN HAKIM
Jabatan : Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum
Selaku atasan langsung Pihak Pertama
Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama pada tahun 2014 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

**PIHAK KEDUA
SEKRETARIS JENDERAL KPU,**

ARIF RAHMAN HAKIM

**PIHAK PERTAMA
KEPALA BIRO LOGISTIK,**

H. BORADI

FORMULIR PENETAPAN KINERJA

Unit Organisasi Eselon II : Biro Logistik - Sekretariat Jenderal KPU
 Tahun Anggaran : 2014

Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya efektivitas pengelolaan data dan dokumentasi kebutuhan logistik Pemilu.	Persentase KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang kebutuhan paket logistik pemilunya tidak sesuai dengan dokumen anggaran	5 %
Meningkatnya efektivitas pengadaan logistik Pemilu.	Persentase KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Gagal Lelang Pengadaan Barang dan Jasa	5 %
Meningkatnya efektivitas pendistribusian logistik Pemilu.	Persentase paket logistik Pemilu pada satker KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang terdistribusikan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat mutu, dan tepat lokasi.	100 %
Meningkatnya efektivitas pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu.	Persentase KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang memelihara logistik Pemilu sesuai dengan SOP.	100 %
	Persentase KPU Kabupaten/Kota melakukan inventarisasi logistik Pemilu sesuai dengan SOP.	100 %

Jumlah Anggaran Tahun 2014 :

Kegiatan Pengelolaan Data, Dokumentasi,
 Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi
 Sarana dan Pra Sarana Pemilu

Rp. 1.275.690.640.000,-.

SEKRETARIS JENDERAL KPU,

ARIF RAHMAN HAKIM

**Jakarta, 27 Maret 2014
 KEPALA BIRO LOGISTIK,**

H. BORADI



KOMISI PEMILIHAN UMUM

**PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA INSPEKTORAT
PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ADIWIJAYA BAKTI

Jabatan : Inspektur

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ARIF RAHMAN HAKIM

Jabatan : Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum

Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2014 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

**PIHAK KEDUA
SEKRETARIS JENDERAL KPU,**

ARIF RAHMAN HAKIM

**PIHAK PERTAMA
INSPEKTUR,**

ADIWIJAYA BAKTI

FORMULIR PENETAPAN KINERJA

Sekretariat Jenderal KPU : Inspektorat
Tahun Anggaran : 2014

Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatkan Efektifitas Pengawasan Internal Terhadap Pengelolaan Anggaran, Aset dan Kepegawaian di Lingkungan KPU	Opini BPK	WTP
	Persentase rekomendasi temuan hasil audit yang ditindaklanjuti	80%
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan KPU	Persentase unit kerja yang berhasil mencapai target kinerja yang ditetapkan	75%
	Persentase Biro, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang nilai evaluasi AKIPnya CC ke atas	25%
	Persentase KPU Provinsi yang menerapkan SPIP sesuai dengan PP 60 tahun 2008	70%

Jumlah Anggaran Tahun 2014

Kegiatan Pemeriksaan Kepegawaian, Keuangan,
dan Perlengkapan pada KPU, KPU Provinsi,
dan KPU Kab/Kota Inspektorat

: Rp 10.168.140.000,00

Jakarta, 27 Maret 2014

SEKRETARIS JENDERAL KPU,



ARIF RAHMAN HAKIM

INSPEKTUR,



ADIWIJAYA BAKTI